



PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



UNIVERSITAS NEGERI PADANG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, kesempatan dan kesehatan yang diberikan sehingga akhirnya draft Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Padang tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Panduan ini disusun dengan tujuan agar setiap program studi, melalui fasilitas dari fakultas, dapat menyusun kurikulum terkini yang mampu mengakomodasi dan sekaligus mengantisipasi perkembangan kebijakan dan perkembangan terbaru.

UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan dasar hukum pengelolaan Perguruan Tinggi di Indonesia. Dalam UU ini ditegaskan bahwa pendidikan tinggi bertujuan : (a) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadimanusia yang beriman dan bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (b). dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang meliputi: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi, perubahan paradigma perguruan tinggi menjadi badan hukum dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Empat perubahan ini harus diakomodasi dalam penyempurnaan kurikulum di perguruan tinggi.

Tidak kalah pentingnya, panduan juga disusun di tengah komitmen UNP untuk merumuskan Rencana Strategis 2020-2024, proses perubahan menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dan *platform* perubahan peradaban yang disebut sebagai Revolusi Industri ke-

4 (IR 4.0). Kurikulum juga mengandung prinsip *Outcome Based Education* (OBE) untuk semua program studi dan prinsip *Multi Entry*, *Multi Exit* (MEME) untuk jenjang pendidikan vokasi

Dengan merujuk kepada panduan ini, maka dapat disusun kurikulum yang terkini, mampu memenuhi standar kebijakan yang ditetapkan, sekaligus menghasilkan lulusan yang memiliki relevansi dengan dunia kerja dan berkiprah di tengah perubahan peradaban IR 4.0. Pada akhirnya, lulusan juga mampu melepaskan dirinya dari ketergantungan bekerja di sektor publik, mampu berinovasi dan memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai dan berkiprah secara global dengan memiliki kompetensi abad ke-21.

Tim penyusun terdiri atas para Wakil Dekan Bidang Akademik se-UNP dan Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana UNP, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Pusat Pembelajaran LP3M, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komputer (PTIK), dan Kepala Bagian Akademik BAK. Atas nama tim, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan semua pihak yang sudah terlibat baik melalui dalam memfasilitasi, serta memberikan masukan dan saran. Ibarat kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak, semua kritik dan saran akan kami terima dengan senang hati dan ucapan terima kasih.

Semoga panduan ini dapat mendukung kemajuan UNP, pelayanan akademik yang lebih baik dan keberhasilan pendidikan tinggi secara umum. Tidak kalah pentingnya, sekaligus kiranya dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua.

Padang, Maret 2020

Rektor,



Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Kebijakan	5
C. Pengertian	7
D. Tujuan Penyusunan Panduan	10
BAB II TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM.....	11
A. Prinsip Perancangan Kurikulum	11
BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI.....	29
A. Implementasi Kurikulum	29
B. Penguatan Implementasi Kurikulum.....	34
C. Postur Kurikulum.....	36
BAB IV SISTEM INFORMASI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (<i>E-learning</i>).....	49
A. Sistem Informasi	49
B. Pembelajaran Elektronik (E-Learning)	51
BAB V PENUTUP	56
LAMPIRAN	57
A. Format/Tempate Kurikulum UNP	57
B. Struktur RPS	58
C. Rekapitulasi Struktur Kurikulum dan Distribusi SKS Program Studi	59
D. Struktur Mata Kuliah Program Studi (S1)	60
E. Tim Penyusun	62

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 314 /UN35/KP/2020

Tentang

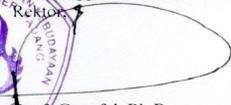
Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Padang Tahun 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Negeri Padang tahun 2020 berdasarkan visi dan misi Universitas Negeri Padang, penerapan revolusi industri 4.0, dan program kewirausahaan, dipandang perlu melakukan perubahan dan pengembangan kurikulum;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran perubahan dan pengembangan kurikulum serta kelancaran proses belajar dan mengajar sesuai dengan kebijaksanaan Kemdikbud tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, serta perlu disusun panduan pengembangan kurikulum;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan SK Rektor tentang pemberlakuan Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Padang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi
8. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum.
10. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program STudi dan Perguruan Tinggi.
11. Permendikbud No. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
12. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Padang Tahun 2020 dipergunakan sebagai Pedoman Pengembangan Kurikulum bagi program studi di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- Kedua : Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Padang Tahun 2020 disusun sesuai dengan kebijakan Mendikbud tentang kampus merdeka dan merdeka belajar.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 30 Maret 2020
Rektor,

Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

Tembusan:

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
3. Wakil Rektor UNP
4. Dekan di UNP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan salah satu Perguruan Tinggi (PT) yang berkomitmen untuk menjaga kualitas lulusan. Melalui lulusan yang berkualitas, UNP ingin menunjukkan bahwa proses pendidikan telah dilaksanakan dengan standar yang tepat. Sebagai sebuah sistem, UNP selalu berupaya meningkatkan kualitas masukan, proses, dan keluaran dan hasil ikutan (*outcome*).

Salah satu komitmen mutu yang selalu menjadi perhatian UNP adalah pemutakhiran kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang selalu menjadi pusat perhatian UNP, selain dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dana dan lingkungan. Untuk itu, kurikulum yang diberikan oleh setiap Program Studi harus dapat menjamin kualitas lulusan

Penyusunan dan pengembangan kurikulum di lingkungan UNP harus memperhatikan Visi dan Misi UNP 2020-2024 yaitu, "Menjadi salah satu universitas unggul dan bermartabat". Sementara itu, misi utama UNP adalah : (1) melaksanakan pendidikan berkualitas Internasional ; (2) melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global ; (3) melaksanakan pengabdian pada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia ; (4) menerapkan tata kelola *world class university* ; dan (5) melaksanakan kerjasama internasional yang teimplementasi dengan baik.

Kurikulum yang disusun harus dapat menjadi bagian yang mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Di antara kemampuan yang perlu dibekali kepada mahasiswa antara lain kemampuan berbahasa asing, kewirausahaan, dan pengalaman-pengalaman internasional khususnya di tingkat Asia.

Lahirnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT), mendorong PT untuk dapat menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang berwawasan Asia, UNP harus mengembangkan kurikulum yang dapat menjamin kualitas lulusan setara dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) sesuai jenjang pendidikan yang telah dirumuskan dalam KKNI. Dalam kaitan ini, lulusan D3 dan S1 harus berada pada level KKNI 5 dan 6. Sementara itu, untuk lulusan S2 dan S3 harus berada pada level KKNI 8 dan 9.

Perkembangan IPTEK dan tuntutan global mengharuskan PT mempunyai kemampuan adaptasi termasuk dalam penyusunan pengembangan kurikulum. Revolusi Industri 4.0 dan tuntutan pendidikan abad ke-21 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan di PT. Untuk beradaptasi dengan perkembangan ini, UNP perlu membekali mahasiswa dengan berbagai kecakapan literasi dasar yaitu literasi baca-tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan (World Economic Forum 2015)¹- Di antara keterampilan yang dibutuhkan dalam Revolusi Industri 4.0 antara lain *coding*, *big data*, *entrepreneurship*, statistik, psikologi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk itu, kurikulum perlu mewadahi mahasiswa dengan berbagai keterampilan tersebut untuk menyiapkan lulusan yang kompetitif dan kreatif.

Di samping tuntutan era revolusi industri, fleksibilitas kurikulum UNP juga perlu dipertimbangkan. Saat ini, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan bidang ilmunya, namun perlu memiliki keterampilan pendukung atau alternatif lain saat mereka memasuki dunia kerja. Untuk itu, kebebasan mahasiswa dalam memilih mata kuliah sesuai dengan kebutuhannya perlu menjadi perhatian sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang "Merdeka Belajar" dan "Kampus Merdeka" yang tertuang dalam Permendikbud Nomor. 3

¹ New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf.

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 18 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui : 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar, dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi

Di dalam peraturan ini dinyatakan bahwa mahasiswa diberi hak untuk belajar di luar program studi pada PT yang sama sebanyak 20 SKS atau 1 (satu) semester dan, dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar PT. Implikasinya adalah, setiap prodi harus menyusun matakuliah yang fleksibel dan juga dapat memberikan matakuliah layanan untuk mahasiswa lain di luar Program Studi yang bersangkutan.

Untuk memenuhi tuntutan dan standardisasi internasional seperti AUN-QA, ASIIN, ABET dan lainnya, kurikulum juga harus memuat kompetensi-kompetensi yang relevan dengan standar lembaga tersebut. Setidaknya, kurikulum UNP mengadopsi prinsip-prinsip *Outcome Based Education* (OBE), yaitu perlunya keselarasan antara matakuliah yang diberikan dengan *outcome* yang diharapkan. Sebagai tambahan, semua mata kuliah harus dipastikan saling terkait dan matakuliah dasar harus mendukung matakuliah lanjutan.

Berdasarkan rasional itu, UNP perlu mengembangkan dan menyesuaikan program dan pengelolaan pendidikannya sehingga dapat terlibat secara aktif dalam percaturan global. Untuk itu salah satu prioritas utama UNP dalam perencanaan program akademiknya adalah menyiapkan kurikulum yang dapat mengantisipasi kebutuhan masa depan dan perubahan kebijakan Depdikbud.

B. Dasar Kebijakan

Sebagaimana disebutkan di atas, KKNI (2012) dan UUPT (2012) merupakan awal perubahan paradigma penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Dengan adanya KKNI, kurikulum disusun dengan penjenjangan yang lebih terarah sesuai dengan kualifikasi tertentu. Dengan UUPT, kurikulum disusun dengan batas minimal-maksimal baik dalam jumlah SKS maupun lama pendidikan. Kedua peraturan itu menjadi dasar penyusunan pengembangan kurikulum agar lebih efektif kualitas sumberdaya manusia dihasilkannya. Inilah salah satu prinsip OBE yang banyak diacu perguruan tinggi bertaraf internasional.

Berdasarkan UUPT Nomor 12 tahun 2012, penyusunan kurikulum adalah hak setiap perguruan tinggi, sesuai dengan karakteristik PT tersebut, meskipun harus mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (pasal 35 ayat 1). Dengan demikian setiap PT (prodi) bebas menentukan baik struktur kurikulum maupun mata kuliah yang ditawarkan dalam satuan pendidikan tertentu. Rambu-rambu yang dinyatakan di dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 (2018).

Selain landasan utama yang telah disebutkan di atas, pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus pula dilandasi oleh filosofi berbangsa, keragaman sosial, daya dorong psikologis untuk terus belajar, dan wawasan kebangsaan. Untuk itu, pengembangan kurikulum UNP dilandasi oleh semangat filosofis dan yuridis sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2024;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara/LN tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara /TLN Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LN tahun 2012 Nomor 158, TLN Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

C. Pengertian

1. **Bahan kajian** (*subject matters*) adalah topik yang dibahas atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dalam disiplin ilmu tertentu dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa;
2. **Bentuk pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. **Capaian pembelajaran lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja;
4. **Evaluasi pembelajaran** adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian;
5. **Evaluasi program kurikulum** adalah sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif);
6. **Indikator penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti;
7. **Kriteria penilaian** (*assessment criteria*) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman

- bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif;
8. **Kurikulum** adalah seperangkat matakuliah, rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
 9. **Kurikulum pendidikan tinggi** adalah kurikulum yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNI, perkembangan IPTEK, perkembangan dunia kerja, serta Visi Perguruan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan;
 10. **Materi pembelajaran** adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis, berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi dll), dan nilai-nilai;
 11. **Mata kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan kepadanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks);
 12. **Merdeka Belajar** adalah sebuah konsep belajar dimana mahasiswa mempunyai kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif, baik di luar Prodi di dalam Perguruan Tinggi, maupun diluar Perguruan Tinggi;
 13. **Metode pembelajaran** adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving society*);
 14. **Pemangku kepentingan** (*stakeholders*) adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perguruan Tinggi.

15. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
16. **Pendidikan tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah atas (SMA/MK/MA) yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
17. **Pengalaman belajar** (*learning experience*) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi internal dan eksternal di lingkungan pembelajarannya.
18. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenjang program dan jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
19. **Profil lulusan** adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya;
20. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** matakuliah adalah rencana proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
21. **Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
22. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

D. Tujuan Penyusunan Panduan

Panduan Pengembangan Kurikulum UNP ini bertujuan sebagai berikut.

1. Memberi panduan bagi Program Studi dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan SN-Dikti dengan mempertimbangkan level kualifikasi menurut KKNI, ide Merdeka Belajar : Kampus Merdeka, Visi dan Misi UNP sebagai Perguruan Tinggi Entrepreneurship Revolusi Industri 4.0, dan Keterampilan Abad 21 untuk menjamin mutu lulusan program diploma/vokasi, sarjana, magister, dan doktor.
2. Memberi panduan dalam rekonstruksi program dan penyelenggaraan pendidikan ditingkat sarjana, magister, dan doktor.
3. Memberi panduan dalam pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor.

BAB II TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM

A. Prinsip Perancangan Kurikulum

Secara umum perancangan kurikulum perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zamannya. Kurikulum harus mengadopsi semangat yang dibawa oleh IPTEK dan relevan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, perancangan kurikulum perguruan tinggi harus memperhatikan berbagai prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas.

Prinsip *relevansi* terlihat pada hasil perolehan pendidikan itu yang bersifat fungsional. Relevansi kurikulum dapat ke luar dan ke dalam kurikulum itu sendiri. Kurikulum relevan ke luar jika tujuan, isi, dan proses belajar yang ditawarkan relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat; dapat mengantarkan mahasiswa untuk mampu hidup dan bekerja dalam masyarakat. Kurikulum relevan ke dalam jika ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian.

Prinsip *fleksibilitas* terlihat pada kelenturan/tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak bagi dosen maupun para mahasiswanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemerdekaan dalam memilih program-program pendidikan bagi mahasiswa dan mengembangkan program pendidikan bagi para dosen.

Prinsip *kontinuitas* terlihat pada kesinambungan pembelajaran antara satu angkatan ke angkatan berikutnya dan dari satu strata ke strata berikutnya. Kontinuitas juga dapat terlihat pada kelanjutan satu jenjang pendidikan dengan pekerjaan yang ada di lapangan

Prinsip *praktis* terlihat pada kemudahan untuk dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang relevan dengan biaya yang relatif kecil. Prinsip ini juga disebut dengan prinsip efisiensi.

Prinsip *efektifitas* terlihat pada ketercapaian oleh dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dan ketercapaian oleh para mahasiswa dalam memperoleh dan menyerap materi pembelajaran.

Tantangan pendidikan di perguruan tinggi saat ini adalah bagaimana peran dan strategi dalam menjembatani kesenjangan antara proses pendidikan di lembaga pendidikan tinggi dengan dunia kerja dan kebutuhan inovasi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mawadahi pendidikan saat ini adalah *Outcome-Based Education (OBE)*, yaitu pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif yang saat ini telah populer dan banyak digunakan di Indonesia. OBE berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum; perumusan tujuan dan capaian pembelajaran; strategi pendidikan; rancangan metode pembelajaran; prosedur penilaian; dan lingkungan/ekosistem pendidikan.

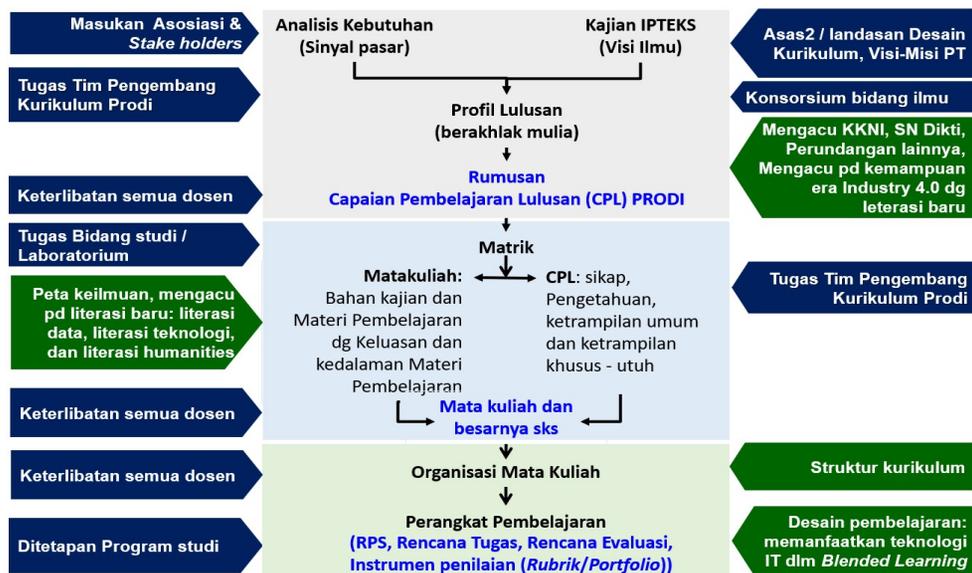
Sesuai dengan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 (2018), perancangan kurikulum di Universitas Negeri Padang dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip di atas dan mengikuti rambu-rambu yang ada di panduan tersebut. Tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) sehingga dihasilkan/dirumuskan (1) profil lulusan. Setelah itu dilakukan kajian-kajian sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) sehingga dihasilkan (2) bahan kajian. Dari kedua hasil tersebut dirumuskan (3) capaian pembelajaran lulusan (CPL), (4) mata kuliah beserta bobot sks nya, dan (5) penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matrik. Dengan demikian, perancangan kurikulum terdiri atas tahap-tahap sebagai berikut.

1. Penetapan profil lulusan;
2. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
3. Penetapan bahan kajian;
4. Pembentukan mata kuliah;

5. Penyusunan matrik organisasi mata kuliah.

Skema keseluruhan tahapan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum



Sumber : Kemristekdikti 2018

Berikut adalah tahapan penyusunan kurikulum program studi yang disarankan di UNP:

1. Penetapan profil lulusan (PL)

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan ditetapkan oleh tim pengembang kurikulum prodi berdasarkan masukan pemangku kepentingan dan hasil kajian terhadap pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil lulusan dapat juga dirumuskan

bersama oleh asosiasi program studi sejenis secara nasional sehingga prodi tertentu mengacu ke rumusan itu sesuai dengan keahlian dosen-dosennya.

Jumlah profil lulusan setiap prodi sangat bergantung pada diversifikasi keahlian dosennya. Misalnya pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, selain sebagai Guru Bahasa Indonesia, profil lulusan dapat juga: Jurnalis, Penyuluh Bahasa Indonesia, dan Editor apabila tenaga pengajarnya mempunyai keahlian dan keterampilan jurnalistik, penyuluhan, editing.

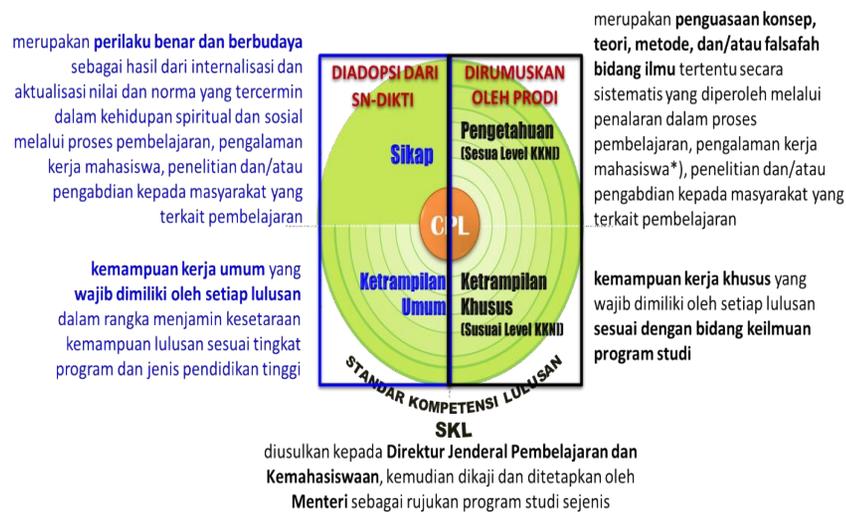
2. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari PL

Setelah ditetapkan PL maka tahap selanjutnya adalah menetapkan kemampuan yang harus dikuasai oleh lulusan agar dapat berperan seperti profil tersebut. Penetapan kemampuan ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan menggunakan lulusan nantinya. Diharapkan pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara prodi (UNP) dengan dunia kerja.

Kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana Permendikbud No. 3 tahun 2020.

3. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SNPT sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur **keterampilan khusus** dan **pengetahuan** dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjang pendidikannya.



*) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Gambar 2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

Tahapan pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 3. Tahapan Pertama - Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga dalam perumusan CPL perlu dilakukan

analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di prodi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.

Rumusan CPL disarankan memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 di antaranya kemampuan tentang:

- literasi data, yaitu kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang *humanities*, komunikasi dan desain;
- pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0;
- pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.

Rumusan CPL program studi di Universitas Negeri Padang harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, khususnya pada unsur pengetahuan dan keterampilan khusus, sedang unsur sikap dan keterampilan umum diambil dari SN-Dikti. Khusus untuk pendidikan Program Sarjana Pendidikan (PSP) dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG), CPL juga harus mengacu pada Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017, tentang Standar Pendidikan Guru. Uraian lengkap cara penyusunan CPL dapat dilihat pada Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang telah disusun oleh tim Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Sesuai Pasal 66 (a) Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 tentang Perubahan SN-Dikti, CPL Pengetahuan (P) & Keterampilan khusus (KK) yang belum dikaji dan ditetapkan Menteri dapat

menggunakan rumusan CPL Pengetahuan (P) & Keterampilan khusus (KK) mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

CPL yang dirumuskan harus jelas, yaitu dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya (AUN-QA, 2015). Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan tuntutan sebagai berikut:

- 1) CPL berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum.
- 2) CPL dirumuskan berdasarkan level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan.
- 3) CPL dirumuskan mengandung visi, misi perguruan tinggi, dan program studi.
- 4) CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan.
- 5) Profil lulusan harus sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan.
- 6) CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa, dan diketahui bagaimana mencapai dan mengukurnya.
- 7) CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala.
- 8) CPL dapat diterjemahkan ke dalam "kemampuan nyata" lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah.

Setiap butir CPL mengandung kemampuan (*behavior/cognitif proses*) dan bahan kajian (*subject matters*), bahkan dapat ditambah konteksnya (*context*) (Tyler, 2013; Anderson & Krathwohl, 2001). Berikut adalah beberapa contoh CPL yang mengandung ketiga komponen tersebut di atas.

Tabel 1. Contoh butir CPL dengan komponen-komponennya

No	Kemampuan (<i>behavior/cognitive proses</i>)	Bahan Kajian (<i>subject matters</i>)	Konteks (<i>context</i>)
1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi	ilmu pengetahuan dan/atau teknologi	sesuai dengan bidang keahliannya.
2	Menyusun	rancangan pembelajaran	yang lengkap baik untuk kegiatan belajar di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
3	Menguasai konsep teoretis	sains-rekayasa (<i>engineering sciences</i>), prinsip-prinsip rekayasa (<i>engineering principles</i>), dan perancangan rekayasa	yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika.

4. Pembentukan mata kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara simultan dilakukan pemilahan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut.



Gambar 4. Tahap kedua - Pembentukan Mata Kuliah

Besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:

- 1) Waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- 2) Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih;
- 3) Media, sumber belajar, sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia;

a. Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran

Setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih terperinci menjadi materi pembelajaran. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL yang

tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
1	Diploma I	Menguasai konsep umum, pengetahuan, dan Keterampilan operasional lengkap;
2	Diploma II	Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan Keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	Diploma III	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Dan keterampilan tertentu secara umum;
4	Diploma IV dan Sarjana	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5	Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
6	Magister (terapan, atau spesialis)	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7	Doktor (terapan, atau sub spesialis)	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada pada program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Selanjutnya CPL prodi yang telah disusun dicek apakah setiap butir telah mengandung kemampuan dan bahan kajian, beserta konteksnya sesuai dengan jenjangnya dengan menggunakan tabel 3 di bawah. Letakan butir-butir CPL prodi pada bagian lajur, sedangkan bahan kajian yang dikandung oleh butir-butir CPL tersebut letakan pada bagian kolom tabel tersebut. Selanjutnya silahkan diperiksa apakah bahan kajian – bahan kajian tersebut telah sesuai dengan disiplin bidang ilmu yang dikembangkan di program studi? Apakah bahan kajian tersebut telah sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan jenjang program studinya? Jika jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah sesuai, maka butir-butir CPL tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pembentukan mata kuliah.

Tabel 3. Matrik Keterkaitan antara CPL dengan Bahan Kajian

No	CPL - PRODI	BAHAN KAJIAN (BK)									
		BK1	BK2	BK3	BK5	BK6	BKn
SIKAP (S)											
1	S1.....		√								
2	S2.....	√									
...										√
PENGETAHUAN (P)											
	P1.....			√							
	P2.....				√						
										
KETRAMPILAN UMUM (KU)											
	KU1.....					√					
	KU2.....								√		
						√				
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)											
	KK1.....							√			
...	KK2.....									√	
...										√

b. Penetapan mata kuliah

1) Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada seperti tabel-4 berikut ini.

Tabel 4. Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

No	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)									
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MKn
SIKAP (S)											
1	S1.....	↑	↑	↑	↑						
2	S2.....	↓	↓	↓	↓						
...										
PENGETAHUAN (P)											
	P1.....	●	●	●	●						
	P2.....	●	●	●	●						
										
KETRAMPILAN UMUM (KU)											
	KU1.....	●	●	●	●						
	KU2.....	●	●	●	●						
										
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)											
	KK1.....	●	●	●	●						
...	KK2.....	●	●	●	●						
...										

REKONSTRUKSI MATA KULIAH
(berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

Berisi:
• Kemampuan
• Bahan Kajian

Matrik tersebut terdiri atas bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (mata kuliah yang sedang berjalan), dan

bagian baris berisi CPL prodi (terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi terhadap mata kuliah yang ada dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan butir-butir CPL tersebut. Butir CPL yang sesuai dengan mata kuliah tertentu diberi tanda bulet (•). Matriks tersebut di atas dapat menguraikan hal-hal berikut:

- a) Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda bulet (•) pada kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Tanda bulet (•) berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.
- b) Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

2) Pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL

Kurikulum program studi baru memerlukan tahapan pembentukan mata kuliah baru. Pembentukan mata kuliah baru didasarkan pada beberapa butir CPL yang dibebankan padanya. Mekanisme pembentukan mata kuliah baru dapat dibantu dengan menggunakan matrik pada tabel 5.

Tabel 5. Matrik pembentukan mata kuliah baru berdasarkan beberapa butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.

No	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)										Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MKn	
SIKAP (S)												
1	S1.....		•	•								4
2	S2.....	•			•	•						3
...											
PENGETAHUAN (P)												
	P1.....	•										3
	P2.....		•	•	•							4
											
KETRAMPILAN UMUM (KU)												
	KU1.....		•	•	•	•						4
	KU2.....	•		•	•	•						5
											1
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)												
	KK1.....	•		•	•							4
 KK2.....		•	•	•							3
											
Estimasi waktu (jam)		90	136	138	95	182						
Bobot MK (sks)		2	3	3	2	4						

PEMBENTUKAN MATA KULIAH
(berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang Lingkup

Cara kerja tabel 5 dalam pembentukan mata kuliah baru adalah sebagai berikut:

- a) Pilih beberapa butir CPL yang terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan (umum atau/dan khusus), beri tanda bulet (•) pada sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah;
- b) Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya (lihat Standar Isi SN-Dikti, pasal 9, ayat 2, atau lihat pada Tabel 2);

- c) Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah, pada kolom paling kanan (Jumlah) dapat diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masing-masing mata kuliah;
- d) Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran sks (1 sks = 50 menit).

c. Penetapan besarnya bobot sks mata kuliah.

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot sks adalah:

- 1) tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- 2) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);
- 3) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).
- 4) Pasal 19 Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti menetapkan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester

Bentuk pembelajran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester

Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul, dan bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

5. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal;
- c. Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8—10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17—21 sks per semester.
- d. Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.



Gambar 8. Tahap ketiga-Penyusunan Organisasi Mata Kuliah Struktur kurikulum

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum perlu dilakukan secara cermat dan sistematis untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai, menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CPL prodi. Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri atas organisasi horizontal dan organisasi vertikal (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 157). Organisasi mata kuliah horizontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh dalam semester yang sama mahasiswa belajar tentang sains dan humaniora dalam konteks untuk mencapai kemampuan sesuai salah satu butir CPL pada Keterampilan Umum: *“mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya”*. Organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan kedalaman penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL prodi yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum jenjang program studi sarjana dengan beban 144 sks secara umum adalah sebagai berikut.

Smt	sks	Jlm MK	KELOMPOK MATA KULIAH PRODI SARJANA TERAPAN						
			MK-Wajib				Mk-Pilihan	MKWU	
VIII	10	3		MK8a (2sks)	TA/Skripsi (6sks)	MK8a (2sks)			
VII	18	5	MK7ua (3sks)	MK7ub (4sks)	MK7uc (4sks)	MK7ud (3sks)			Agama (2sks)
VI	20	5	MK6ua (4sks)	MK6ub (4sks)	MK6uc (4sks)	MK6ud (6sks)		MK6ue (2sks)	
V	20	5	MK5ua (4sks)	MK5ub (4sks)	MK5uc (4sks)			MK5ud (4sks)	Bhs. Indonesia (2sks)
IV	20	6	MK4ua (3sks)	MK4ub (3sks)	MK4uc (5sks)	MK4ud (3sks)	MK4uf (2 sks)	MK4ue (4sks)	
III	20	5	MK3ua (4sks)	MK3ub (4sks)	MK3uc (4sks)	MK3ud (6sks)	MK3ue (2sks)		
II	18	5	MK2ua (4sks)	MK2ub (4sks)	MK2uc (4sks)	MK2ud (4sks)			Kewarganegaraan (2sks)
I	18	6	MK1ua (4sks)	MK1ub (4sks)	MK1uc (4sks)	MK1ud (2sks)	MK1ue (2sks)		Pancasila (2sks)
	144	40							

Gambar 9. Matrik Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI

A. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum merupakan salah satu bagian penting dari manajemen kurikulum. English & Larson (2013: 1) menyatakan bahwa manajemen kurikulum merupakan seluruh proses penyampaian tujuan dan isi kurikulum dalam praktik pembelajaran di Program Studi. Implementasi merupakan bagian dari keseluruhan manajemen kurikulum yang mencakup pengembangan (*development*), implementasi (*implementation*), umpan balik (*feedback*), evaluasi (*evaluation*), modifikasi (*modification*) dan konstruksi (*construction*). Dengan demikian, posisi implementasi kurikulum sangat strategis dan terkait dengan komponen manajemen lainnya.

Implementasi kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses penerapan gagasan, ide, tujuan, dan keseluruhan program yang termuat dalam suatu kurikulum. Setiap kurikulum, termasuk kurikulum baru memiliki gagasan dan ide yang tercermin dalam tujuan, program, dan pendekatan dalam proses pembelajaran maupun dalam sistem evaluasi. Dalam kaitan dengan gagasan baru dari setiap kurikulum baru, Herbert Altrichter (2005, 2005:35-62), mengemukakan bahwa: kurikulum baru dapat dimaknai sebagai perubahan dalam praktik pengajaran dan pembelajaran yang juga termasuk transformasi berbagai kepercayaan dan pemahaman yang berada pada posisi layak dirubah. Perubahan ini biasanya tercantum secara kuat dalam kurikulum tertulis, buku teks, rekomendasi strategi mengajar, materi kerja untuk mahasiswa dan dimungkinkan juga dalam bentuk perangkat-perangkat baru dalam pembelajaran.

Berasarkan yang dikemukakan di atas, tampak bahwa setiap kurikulum baru membawa konsekuensi yang digambarkan sebagai suatu perubahan. Perubahan itu terutama terjadi pada tataran praktik pembelajaran, yang menjadi bagian dari suatu proses pembaharuan.

Implementasinya memerlukan dukungan kebijakan, ketersediaan bahan pustaka, strategi pembelajaran, serta berbagai perangkat pembelajaran. Semua ini merupakan kondisi yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. Karenanya, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian dalam manajemen implementasi kurikulum.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam implementasi kurikulum, antara lain, perencanaan, dokumen kurikulum, dosen, sarana dan prasarana, iklim budaya perguruan tinggi, dan pimpinan lembaga.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan faktor strategis dalam implementasi kurikulum, terutama kurikulum baru. Perencanaan implementasi penting sebagai acuan dalam pendayagunaan semua sumber daya, baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. Perencanaan dapat menjadi instrumen penting untuk evaluasi implementasi kurikulum. Labane (2009:5) mengemukakan, "*Curriculum implementation plans are required to assist the implementers to obtain a common understanding of the required curriculum practice. These plans become devices for identifying ways of solving or minimizing problems related to implementation.*" Setiap kurikulum, terutama kurikulum baru akan menghadapi banyak masalah pada tataran implementasi. Perencanaan akan membantu mengidentifikasi cara-cara mengatasi masalah dan sekaligus membantu mengurangi masalah yang akan muncul dalam implementasi.

2. Dokumen Kurikulum

Kurikulum merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri, yang mencakup karakteristik:

- a. Memiliki kejelasan, baik tujuan, pendekatan, dan maupun tata kelola. Kejelasan ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi multitafsir mengenai tujuan, struktur, isi, pendekatan, dan sistem penilaian kurikulum itu sendiri.

- b. Realistik dan relevan. Kurikulum yang realistik dan relevan memberi ruang bagi dosen untuk mengembangkan bahan ajar yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan anak dan lingkungannya.
- c. Kerangka konseptual sebagai dasar pengembangan bahan ajar. Altrichter (2005:1) menyebutkan *conceptual matters* sebagai salah satu *limiting factors* dalam implementasi kurikulum.

Bennie & Newstead (1999:3) mengemukakan beberapa kesalahan kurikulum, antara lain kesalahan konstruksi (*construction errors*), kesalahan isi (*content errors*), dan ketidakcocokan isi (*inappropriate content*) kurikulum. Kelemahan dalam konstruksi kurikulum bisa berupa perencanaan dan pengembangan. Evaluasi terhadap kurikulum lama, kajian dan analisis terhadap kerangka konseptual dan kontekstual kurikulum baru, serta keterlibatan berbagai pihak termasuk keterlibatan pengguna kurikulum sangat penting untuk memperkuat konstruksi kurikulum baru.

Kesalahan dalam hal isi dapat dilihat dari relevansi dan kontekstualitas isi kurikulum. Hal ini dapat menyebabkan anak menerima materi yang tidak standar dan akan berimplikasi pada kemampuan kompetitif anak.

Kesesuaian isi kurikulum terlihat dari aspek psikologis, yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan inteligensi, sosial, dan moral anak. Artinya, sikuens bahan ajar sudah harus memperhatikan perkembangan kemampuan psikologis anak.

3. Dosen

Dosen (guru) mempunyai peranan yang penting dalam pengimplementasian kurikulum, terutama dalam menjadikan kurikulum sebagai sesuatu yang aktual (*actual curriculum*) dalam kegiatan pembelajaran. Altrichter (2005:9) menyebutkan tiga faktor penting dari Dosen dalam pengimplementasian kurikulum, yaitu (1) kompetensi dan sikap (*competencies and attitude*); (2)

partisipasi pengambilan keputusan (*decision-making participation*); dan (3) mutu hubungan kolegal (*quality of collegial relationship*). Ketiga faktor itu menunjuk pada kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi ke pribadian, dan kompetensi sosial.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mempunyai peranan penting dalam implementasi kurikulum. Bagian Ketujuh Permendikbud No. 3 tahun 2020 mengatur tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran di PT. Sarana dan prasarana utama yang sangat diperlukan adalah:

- a. Lahan, ruang kelas, perpustakaan, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum
- b. Buku, buku elektronik, jurnal dan repositori
Perubahan kurikulum akan berimplikasi pada perubahan materi dan isi kurikulum. Hal ini berarti diperlukan buku (materi) baru. Manajemen perbukuan dalam rangka implementasi kurikulum baru akan mencakup (1) penentuan jenis, bentuk, dan isi; (2) pengadaan; (3) distribusi; dan (4) evaluasi dan umpan balik terhadap buku yang baru tersebut.
- c. Laboratorium peralatan dan bahan.
Peralatan dan bahan sudah harus tersedia dalam rasio yang mencukupi dan memenuhi standar mutu minimal laboratorium di samping ketersediaan berbagai jenis, bentuk, dan model media pembelajaran, baik cetak maupun elektronik. Semua itu harus dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen. Dan hal yang sangat penting lagi adalah pemeliharaan, perawatan, dan pengembangan sarana dan prasarana tersebut.
- d. Jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
- e. Sarana teknologi indormasi dan komunikasi.
- f. Sarana olahraga.
- g. Sarana berkesenian.

- h. Sarana fasilitas umum.
- i. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
- j. dan lain-lain

Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik, metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Beberapa catatan penting yang dapat diambil dari Permendikbud ini adalah penyediaan akses bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Untuk ini diperlukan sarana yang lebih spesifik seperti: label dengan huruf Braille, informasi dalam bentuk suara, ramp untuk kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di koridor atau jalan, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk timbul dan toilet/kamar mandi untuk penyandang difable.

5. Iklim dan Budaya Perguruan Tinggi

Kurikulum baru juga memuat banyak hal yang baru. Inovasi-inovasi baru dapat mencakup tema-tema yang diusung, tata kelola, pendekatan dalam proses pembelajaran, muatan dan isi kurikulum, dan sistem penilaian. Semua itu membutuhkan perubahan dalam pola pikir, sikap, dan juga iklim serta budaya. Dosen yang terbiasa dengan praktik pembelajaran yang *rote learning* membutuhkan perubahan cara berpikir dan sikap terhadap pendekatan pembelajaran yang ilmiah (*scientific approach*) yang sangat mengedepankan aktivitas belajar secara ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi.

Iklim Perguruan tinggi harus dibangun untuk membentuk sikap dan perilaku. Bennie & Newstead mengemukakan bahwa budaya perguruan tinggi dapat saja menjadi faktor penghambat dalam penerapan inovasi kurikulum baru. Dengan merujuk hasil

penelitian Nickson yang dilakukan di beberapa lembaga pendidikan di Afrika Selatan, Kate dan Karen (2005:7) menyampaikan sebagai berikut. "... *This suggests that the existing culture in South African schools is going to have an important influence on the implementation of Curriculum 2005.*" Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa budaya perguruan tinggi mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam implementasi kurikulum.

6. Pimpinan Lembaga

Pimpinan Lembaga mengemban fungsi manajerial yang mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan. Dimba (2001:60-62) melalui hasil penelitiannya mengemukakan lima peran penting pimpinan dalam implementasi kurikulum, antara lain; (1) mengorganisir kegiatan pengembangan; (2) mengembangkan berbagai strategi untuk membimbing dosen; (3) melakukan kolaborasi dengan pengguna (*stakeholders*); dan (4) melibatkan pengguna (*stakeholders*) dan orang tua dalam manajemen kurikulum.

B. Penguatan Implementasi Kurikulum

Agar implementasi kurikulum dapat berjalan sesuai harapan, implementasi kurikulum perlu didukung oleh strategi berikut:

1. Perencanaan yang komprehensif

Perencanaan yang komprehensif sangat penting dalam implementasi kurikulum baru. Komprehensitas perencanaan mencakup: (a) ketersediaan dokumen kurikulum setiap program studi; (b) perencanaan sosialisasi yang meliputi; pemanfaatan berbagai media untuk sosialisasi dan tingkat pemahaman terhadap kurikulum baru; (c) perencanaan sistem pendukung yang meliputi sarana prasarana dan sumber daya, yakni sumber daya manusia dan

sumber daya finansial; dan (d) perencanaan tahapan waktu pelaksanaan, serta keterlibatan *stakeholders*.

2. Penguatan Sumber Daya

Sumber daya terdiri atas sumber daya manusia dan bahan ajar. Dosen adalah faktor utama dalam pengimplementasian kurikulum. Seorang dosen harus memiliki; (a) kompetensi profesional; (b) kompetensi pedagogic; (c) kompetensi social dan (d) kompetensi personal. Untuk penguatan sumber daya ini, dosen perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan secara partisipatif dalam implementasi kurikulum yang baru. Dengan ini terbangunlah hubungan kolegial yang berkualitas karena implementasi kurikulum. Fakultas dan jurusan/program studi diharapkan dapat melaksanakan pelatihan implementasi kurikulum dan sekaligus melaksanakan workshop untuk merevisi kurikulum yang sudah dimiliki sehingga relevan dengan konteks perubahan yang sedang berlangsung. Para dosen yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan mengenai kurikulum yang berorientasi menyongsong Revolusi Industri 4.0 dapat menjadi narasumber dan sejawat sebagai mitra dalam implementasi lebih lanjut terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran .

3. Penguatan Pembelajaran di Program Studi

Implementasi *kurikulum* secara aktual terjadi dalam proses pembelajaran. Beberapa aspek yang perlu diperkuat dalam pembelajaran antara lain; (a) ketersediaan rencana pembelajaran semester (RPS); (b) pengembangan strategi pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan; dan (c) perangkat penilaian.

4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Penguatan monitoring dan evaluasi (monev) dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan kurikulum. Laporan monev mengungkap kesulitan dalam implementasi serta memberikan solusi dan strategi perbaikan. Monev dilakukan pada pelaksanaan kurikulum di tingkat mikro, program studi dan kelas-

kelas melalui kegiatan proses belajar mengajar. Umpan balik dalam monev ditujukan pada dosen, pimpinan lembaga, dan mahasiswa.

C. Postur Kurikulum

Untuk mengakomodir berbagai isu strategis seperti revolusi industri 4.0, Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dengan program “Merdeka Belajar” serta perubahan visi dan misi UNP menjadi universitas unggul di Asia, maka disusunlah postur kurikulum di setiap jenjang pendidikan di UNP dengan memperhatikan distribusi matakuliah wajib nasional serta wajib dan pilihan universitas seperti Tabel 6.

Merupakan kebijakan nasional melalui pasal 35 ayat 3 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa secara nasional kurikulum pendidikan tinggi untuk setiap program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah:

- a. Agama;
- b. Pancasila;
- c. Kewarganegaraan; dan
- d. Bahasa Indonesia;

Tabel 6. Matakuliah Wajib Nasional dan Universitas dalam Perumusan Kurikulum Program Studi

Kelompok Matakuliah	Nama Matakuliah		SKS			
			S1		Diploma	
			KP	NK	D4	D3
Wajib Nasional (WN)	1	Pendidikan Agama	3	3	3	3
	2	Pendidikan Pancasila	2	2	2	2
	3	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
	4	Bahasa Indonesia	2	2	2	2
	Jumlah SKS		9	9	9	9
Wajib Universitas (WU)	1	Pengantar Kewirausahaan *	2	2	2	2
	2	Bahasa Inggris	2	2	2	2
	3	Pengantar Coding	3	3	3	3
	4	KKN **	2	2	2	
	5	Pengantar Psikologi **		2	2	
	6	Dasar-dasar IP	2			
	7	Psikologi Pendidikan	2			
	8	Administrasi dan Supervisi Pendidikan	2			
	9	Bimbingan Konseling	2			
Jumlah SKS		17	11	11	7	
Wajib Pilihan Universitas (Pilih 2 sks dari 6 Sks)	1	Bahasa Arab	2	2	2	2
	2	Bahasa Mandarin	2	2	2	2
	3	Bahasa Jepang	2	2	2	2
	Jumlah SKS		6	6	6	6

Catatan :

- *) ditawarkan semester 1 dan 2 kemudian dilanjutkan dengan matakuliah Aplikasi Kewirausahaan 3 SKS sebagai matakuliah wajib prodi dan diatur di prodi masing-masing.
- ***) tidak diambil oleh mahasiswa Diploma 3.

Implementasi dari prinsip di atas dilaksanakan berbeda di setiap jenjang, mulai dari jenjang program diploma III, diploma IV (vokasi), S1 dan S2 (akademik sarjana), S2, S3, dan S3 jalur penelitian (*by research*), serta Pendidikan profesi.

Tabel 7. Perbandingan Postur Kurikulum Menurut Jenjang Studi

Nama Mata Kuliah	Jenjang Studi						
	D III	D IV	S1	S2	S3	BR	PR
Wajib Nasional (WN)	√	√	√				
Wajib Universitas (WU)	√	√	√				
Pilihan Wajib Universitas (PWU)	√	√	√				
Wajib Fakultas (WF)	√	√	√	√	√		
Pilihan Wajib Fakultas (PWF)	√	√	√	√	√	√	√
Wajib Program Studi (WPS)	√	√	√	√	√	√	
Tugas Akhir (TA)	√	√	√	√	√		
Praktek Lapangan (PL)	√	√	√				
Kuliah Kerja Nyata (KKN)		√	√				

Rentang jumlah SKS tiap jenjang studi di lingkungan Universitas Negeri Padang seperti pada table berikut ini.

Tabel 8. Rentang Jumlah SKS Menurut Jenjang Studi

Jenjang Studi	Jumlah SKS
Diploma III	108 - 114 SKS
Diploma IV	144 - 148 SKS
Sarjana (S1)	144 - 148 SKS
Magister (S2)	36 - 42 SKS
Doktor (S3)	42 - 46 SKS
Doktor (S3) (By Research)	By Research
PR (Profesi)	24 SKS

Di bawah ini dibahas postur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan disusun berdasarkan kategori mata kuliah, besaran sks, dan semester pengambilannya.

1. Postur Kurikulum Program Studi S1 Kependidikan

Postur kurikulum S1 Kependidikan dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Postur Kurikulum Program Studi Kependidikan (Non Merdeka Belajar)

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wajib Nasional (WN)	9								
Wajib Universitas (WU)	17								
Pilihan Wajib Universitas	2								
Matakuliah Fakultas (WF) dan Program Studi (WPS) (termasuk TA, KKN dan PL)	116								
TA (Tugas Akhir)									
PL (Praktek Lapangan)									
KKN (Kuliah Kerja Nyata)									
	144	20	20	22	22	20	20	12	8

Sedangkan Postur kurikulum S1 Kependidikan Merdeka Belajar dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Postur Kurikulum Program Studi Kependidikan (Merdeka Belajar)

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wajib Nasional (WN)	9								
Wajib Universitas (WU)	17								
Pilihan Wajib Universitas	2								
Matakuliah Fakultas (WF) dan Program Studi (WPS) (termasuk TA, KKN dan PL)	56								
Matakuliah Merdeka Belajar Dalam Kampus UNP* matakuliah prodi yang dapat diganti dengan matakuliah prodi lain dalam kampus	20*								

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Matakuliah Merdeka Belajar Luar Kampus UNP * matakuliah prodi yang dapat diganti dengan matakuliah prodi lain di luar kampus atau non perguruan tinggi	40*								
TA (Tugas Akhir)									
PL (Praktek Lapangan)									
KKN (Kuliah Kerja Nyata)									
	144	20	20	22	22	20	20	12	8

Nama matakuliah wajib fakultas dan matakuliah wajib program studi ditentukan di tingkat fakultas. Pembelajaran di luar program studi di lingkungan UNP maksimal dilaksanakan selama 1 semester atau setara dengan 20 sks. Untuk program studi kependidikan, merdeka belajar hanya dilaksanakan selama 2 semester, karena 1 semester dihabiskan untuk melaksanakan PLK yang karena program studi kependidikan adalah khas, tidak dapat disetarakan dengan mata kuliah merdeka belajar. Untuk kejelasan, maka kolom yang berwarna kuning merupakan kolom merdeka belajar, dimana mahasiswa diberikan kebebasan berdasarkan petunjuk mata kuliah/kegiatan/aktivitas merdeka belajar.

2. Postur Kurikulum Program Studi S1 Non Kependidikan

Postur kurikulum S1 Non- Kependidikan dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Postur Kurikulum Program Studi S1 Non-Kependidikan (Non Merdeka Belajar)

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wajib Nasional (WN)	9								
Wajib Universitas (WU)	11								
Pilihan Wajib Universitas	2								
Matakuliah Fakultas (WF) dan Program Studi (WPS) (termasuk TA, KKN dan PL)	122								
TA (Tugas Akhir)									
PL (Praktek/Magang)									
KKN (Kuliah Kerja Nyata)									
	144	20	20	22	22	20	20	12	8

Sedangkan postur kurikulum S1 Non-Kependidikan Merdeka Belajar dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Postur Kurikulum Program Studi S1 Non-Kependidikan (Merdeka Belajar)

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wajib Nasional (WN)	9								
Wajib Universitas (WU)	11								
Pilihan Wajib Universitas	2								
Matakuliah Fakultas (WF) dan Program Studi (WPS) (termasuk TA, KKN dan PL)	62								
Matakuliah Merdeka Belajar Dalam Kampus UNP *	20*								

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
matakuliah prodi yang dapat diganti dengan matakuliah prodi lain dalam kampus									
Matakuliah Merdeka Belajar Luar Kampus UNP * matakuliah prodi yang dapat diganti dengan matakuliah prodi lain di luar kampus atau non perguruan tinggi	40*								
TA (Tugas Akhir)									
PL (Praktek/Magang)									
KKN (Kuliah Kerja Nyata)									
	144	20	20	22	22	20	20	12	8

Nama matakuliah wajib fakultas dan matakuliah wajib program studi ditentukan di tingkat fakultas. Pembelajaran di luar program studi di lingkungan UNP maksimal dilaksanakan selama 1 semester atau setara dengan 20 sks. Untuk kejelasan, maka kolom yang berwarna kuning merupakan kolom merdeka belajar, dimana mahasiswa diberikan kebebasan berdasarkan petunjuk dari program studi untuk mengambil mata kuliah/kegiatan/aktivitas merdeka belajar. Seandainya pelaksanaan magang dilaksanakan selama 1 semester, maka bobot sks magang diberikan setara dengan 20 sks, dengan syarat pelaksanaan magang dirinci dalam berbagai item kegiatan yang secara aturan dapat disetarakan dengan sks mata kuliah yang relevan.

3. Postur Kurikulum Program Studi Vokasi D4

Postur kurikulum Vokasi D4 dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Postur Kurikulum Program Studi Vokasi (Non Merdeka Belajar)

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wajib Nasional (WN)	9								
Wajib Universitas (WU)	11								
Pilihan Wajib Universitas	2								
Matakuliah Fakultas (WF) dan Program Studi (WPS) (termasuk TA, KKN, dan PL)	122								
TA (Tugas Akhir)									
PL (Praktek/Magang)									
KKN (Kuliah Kerja Nyata)									
	144	18	18	18	18	20	20	20	12

Sedangkan postur kurikulum Vokasi D4 Merdeka Belajar dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Postur Kurikulum Program Studi Vokasi (Merdeka Belajar)

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wajib Nasional (WN)	9								
Wajib Universitas (WU)	11								
Pilihan Wajib Universitas	2								
Matakuliah Fakultas (WF) dan Program Studi (WPS) (termasuk TA, KKN, dan PL)	62								

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Matakuliah Merdeka Belajar Dalam Kampus UNP *	20*								
matakuliah prodi yang dapat diganti dengan matakuliah prodi lain dalam kampus									
Matakuliah Merdeka Belajar Luar Kampus UNP *	40*								
matakuliah prodi yang dapat diganti dengan matakuliah prodi lain di luar kampus atau non perguruan tinggi									
TA (Tugas Akhir)									
PL (Praktek/Magang)									
KKN (Kuliah Kerja Nyata)									
	144	18	18	18	20	18	20	20	12

Praktek Lapangan di Industri (PLI) termasuk matakuliah merdeka belajar di luar kampus. Penyelenggaraan program vokasi dilaksanakan dengan mengikuti prinsip *multi-entry* dan *multi-exit* (MEME) dimana mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan (terminasi) dengan pola sebagai berikut:

- menyelesaikan 2 (dua) semester setara D1
- menyelesaikan 4 (empat) semester setara D2
- menyelesaikan 6 (enam) semester setara D3
- menyelesaikan 8 (delapan) semester setara D4

Pada setiap tingkatan, mahasiswa akan mendapatkan sertifikat dan ijazah sesuai dengan jenjang penyelesaian sks (D1, D2, D3 dan D4).

4. Postur Kurikulum Program Studi Vokasi D3

Tabel 15. Postur Kurikulum Program Studi Vokasi D3

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester					
		1	2	3	4	5	6
Wajib Nasional (WN)	9	5	4				
Wajib Universitas (WU)	7		2	3		2	
Pilihan Wajib Universitas	2			2			
Matakuliah Fakultas (WF) dan Program Studi (WPS)	90	3	12	13	18	16	4
(termasuk Praktek/Magang)							
TA (Tugas Akhir)							4
	108	8	18	18	18	18	8

5. Postur Kurikulum Program Studi Pascasarjana

Pendidikan pascasarjana di UNP dilaksanakan dalam tiga kategori. Cabang keilmuan multidisiplin dilaksanakan oleh Program Pascasarjana (PPS) UNP, sementara untuk cabang keilmuan oligodisiplin dan monodisiplin dilaksanakan oleh Fakultas dan dimungkinkan pula dilaksanakan oleh Jurusan yang relevan. Pada saat ini pascasarjana UNP terdiri dari program Magister (S2), program reguler Doktor (S3) dan program Doktor (S3) jalur penelitian (*by research*). Prinsip merdeka belajar tidak dilaksanakan di program pascasarjana, namun demikian pelaksanaan program doktor jalur penelitian, memberikan peluang kepada mahasiswa dan promotor untuk mengambil mata kuliah dan atau kegiatan yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan.

a. Program Studi Magister (S2)

Tabel 16. Postur Kurikulum Program Magsiter

Kelompok Mata Kuliah	S-2
Mata Kuliah Umum	6 SKS
a. Metodologi Penelitian	2 SKS
b. Statistik	2 SKS
c. Filsafat Ilmu	2 SKS
Mata Kuliah Dasar Keahlian	4 SKS
Mata Kuliah Keahlian	-
1. Wajib	14—16 SKS
2. Pilihan	2 SKS
Tesis	10 SKS
Jumlah	36—38 SKS

b. Program Doktor (regular)

Tabel 17. Postur Kurikulum Program Doktor

Kelompok Mata Kuliah	S-3
Mata Kuliah Umum	6 SKS
a. Metodologi Penelitian	2 SKS
b. Statistik	2 SKS
c. Filsafat Ilmu	2 SKS
Mata Kuliah Dasar Keahlian	2 SKS
Mata Kuliah Keahlian	-
1. Wajib	16—18 SKS
2. Pilihan	4 SKS
Disertasi	14 SKS
Jumlah	42—44 SKS

c. Program Doktor Jalur Penelitian (*By Research*)

Program Doktor jalur penelitian memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk langsung melakukan penelitian dengan syarat sebelum registrasi sudah memiliki ide penelitian yang relevan dengan program studi. Mahasiswa juga dituntut untuk sudah memiliki kompetensi dasar keilmuan yang memadai untuk melaksanakan program Doktor.

Tabel 18. Postur Kurikulum Program Doktor Jalur Penelitian

Kelompok Mata Kuliah	S-3
Semester 1 Research and progress 1 (Kajian Literatur)	5 SKS
Semester 2 Research and progress 2 (Proposal Penelitian)	4 SKS
Semester 3 Research and progress 3 (Instrumen Penelitian)	4 SKS
Semester 4 Research and progress 4 (Seminar Hasil)	5 SKS
Semester 5 Research and progress 5 (Publikasi jurnal dan prosiding internasional)	10 SKS
Semester 6 Ujian Disertasi	14 SKS
Jumlah	42-44 SKS

Pelaksanaan program Doktor jalur penelitian mengharuskan mahasiswa untuk mukim selama satu semester. Penyelenggara program studi diberikan peluang untuk membuka mata kuliah jika dirasakan perlu mata kuliah pendukung (Metode Penelitian, Statistik), terutama jika promotor meminta mahasiswa untuk mengikuti matakuliah tertentu untuk menyelesaikan penelitian. Seandainya diperlukan untuk mengambil mata kuliah, maka isi dan jenis matakuliah ditentukan oleh masing-masing program studi.

6. Postur Kurikulum Program Pendidikan Profesi Konselor

Program PPK bertujuan untuk menghasilkan tenaga profesional ahli yang menyandang gelar profesi yang mampu melaksanakan pelayanan profesi bagi masyarakat luas. Pendidikan profesi diharapkan menghasilkan tenaga profesional yang memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap untuk memberikan pelayanan kepada para individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan permasalahan dan tuntutan. Pelaksanaan pendidikan profesi didasarkan untuk perkembangan masyarakat, prinsip-prinsip keilmuan, teknologi dan pelayanan

Pelaksanaan Pendidikan profesi disesuaikan dengan profesi dimaksud, yang merupakan kewenangan penyelenggara program. Pendidikan profesi setidaknya berbobot 36 sks dengan penekanan pada diperolehnya pengalaman praktik langsung layanan profesional yang diberikan. Penyelenggara program diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum yang pada prinsipnya dapat mengadopsi perkembangan permasalahan dan konteks perkembangan merdeka belajar, revolusi industry 4.0 dan visi misi UNP ke depan.

BAB IV

SISTEM INFORMASI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (*E-learning*)

A. Sistem Informasi

Pengembangan kurikulum UNP diikuti dengan pengembangan sistem informasi kurikulum yang efektif dan efisien. Pengembangan sistem informasi kurikulum mengikuti pengembangan kurikulum secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan prodi. Pengembangan sistem informasi kurikulum tidak hanya terkait dengan informasi perubahan struktur matakuliah pada masing-masing prodi tapi juga mengintegrasikan penyempurnaan perangkat pembelajaran, seperti silabus, rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan, dan bahan/materi ajar untuk setiap mata kuliah.

Sistem informasi kurikulum menyajikan informasi yang sesuai dengan lingkup dan satuan kredit semester (SKS) sesuai dengan jenjang pendidikan. Kurikulum sesuai dengan ruang lingkup (*scope*) jenjang pendidikan (S1 atau D3/D4). Kurikulum pada setiap program studi dikendalikan melalui *learning outcome* (LO) tiap mata kuliah. Koherensi kurikulum memperhatikan keterkaitan antar mata kuliah, baik yang serumpun maupun antar bidang studi termasuk mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan di luar UNP. Dalam kaitannya dengan kampus merdeka, sistem informasi kurikulum menyajikan informasi yang lengkap tentang mata kuliah dan penawarannya disetiap semester untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan beban SKS.

Sistem informasi kurikulum mensinkronkan setiap mata kuliah yang ada dalam prodi dengan mata kuliah diluar prodi sesuai dengan kebijakan kampus merdeka. Secara khusus hal ini terlihat dari keterkaitan antar mata kuliah dalam satu program studi di lingkungan UNP khususnya pada mata kuliah universitas (mata kuliah dasar kependidikan dan mata kuliah umum). Pengorganisasian kurikulum secara

kelembagaan di UNP dilakukan melalui penantaan mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah tingkat universitas, tingkat fakultas, dan tingkat program studi.

Hubungan intra dan antar disiplin ilmu menjadi pertimbangan bagi tiap program studi dalam menyusun kurikulum. Derajat integrasi materi pembelajaran antar mata kuliah dijaga dengan sangat baik. Penataan ini dilakukan melalui penetapan mata kuliah prasyarat yang harus diikuti sebelum mengambil mata kuliah tertentu. Derajat integrasi materi pelajaran dapat dilihat dari sebaran mata kuliah yang berasal dari mata kuliah tingkat universitas, fakultas, dan program studi.

Untuk kurikulum S1, integrasi mata kuliah menunjukkan keterkaitan antara mata kuliah program studi dengan mata kuliah atau kegiatan yang terkait dengan kurikulum kampus merdeka. Mata kuliah yang disajikan memperlihatkan mata kuliah dan kegiatan yang dapat dipilih oleh mahasiswa baik diluar prodi dalam UNP maupun di luar UNP. Secara lengkap kurikulum disajikan pada laman <http://kurikulum.unp.ac.id>

Sedangkan untuk kurikulum vokasi (diploma), sistem informasi kurikulum menampilkan *Multi Entry Multi Exit System (MEMES)*. Struktur kurikulum program diploma disusun berdasarkan mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa sesuai dengan kompetensi di jenjang D1, D2, D3 dan D4. Keterkaitan tiap jenjang diploma harus ada, misalnya mahasiswa yang telah menyelesaikan jenjang Diploma 1 dapat melanjutkan kuliah ke Diploma 2 dan seterusnya.

Sistem informasi kurikulum memperhatikan kemudahan entri kurikulum dan dapat mengakomodir kebutuhan prodi untuk melakukan penyempurnaan kurikulum secara periodik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum. Selain itu, sistem informasi kurikulum menjamin keterlibatan stakeholder dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum. Monitoring dan evaluasi kurikulum dilakukan oleh pimpinan program studi, dosen, dan mahasiswa secara online. Sistem informasi

kurikulum sejalan dan sinkron dengan sistem pembelajaran dan sistem lain dengan efektif dan efisien menggunakan teknologi informasi.

Beberapa sistem terkait perangkat pembelajaran dapat diakses secara online melalui Learning Management System (<http://elearning.unp.ac.id>). Penyusunan jadwal kuliah dilakukan secara terpadu melibatkan program studi melalui portal UNP (<http://sia.unp.ac.id>). Pengelolaan nilai dan bimbingan akademik mahasiswa oleh dosen dilakukan melalui portal pada laman <http://portal.unp.ac.id>. Kurikulum juga dapat diakses oleh dosen PA pada laman bimbingan akademik mahasiswa yang bersangkutan. Sistem informasi kurikulum dapat menghindari mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah yang seharusnya atau menuntun mahasiswa secara terstruktur mengambil mata kuliah sesuai dengan semester yang seharusnya.

B. Pembelajaran Elektronik (E-Learning)

E-learning atau disebut juga pembelajaran elektronik (daring) dimana proses pembelajaran mata kuliah disajikan dalam *virtual classroom* menggunakan konten pembelajaran elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Pembelajaran daring UNP adalah perkuliahan yang aktivitas pembelajaran dilakukan secara online (non tatap muka) menggunakan *platform LMS Moodle* dengan alamat domain <https://elearning.unp.ac.id>. Sampai saat ini, Moodle digunakan sebagai perangkat LMS yang dapat dimanfaatkan dosen dalam menyelenggarakan pembelajaran secara daring/online yang menyediakan fitur lengkap untuk mengakomodir struktur perkuliahan daring. Dalam implementasinya, aktivitas pembelajaran daring dilaksanakan dalam berbagai aktivitas yang merupakan bagian dari proses pembelajaran seperti pengisian daftar hadir, penyampaian materi kuliah, diskusi dan interaksi, penugasan, quiz maupun penyampaian kesimpulan dilakukan sepenuhnya secara online (non tatap muka) menggunakan fitur-fitur LMS e-learning UNP.

Pelaksanaan proses pembelajaran daring di UNP merupakan respon dan sekaligusantisipasi dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0. Sesuai dengan aturan yang berlaku, setiap dosen melaksanakan pembelajaran secara daring maksimal 50 % dari total pertemuan. Dosen yang menyelenggarakan kuliah daring wajib memenuhi materi daring untuk 16 kali pertemuan, namun membuat silabus dan RPS serta materi perkuliahan untuk setiap pertemuan yang dilaksanakan secara daring.

1. Prosedur Pendaftaran Mata Kuliah Daring
 - a. Kuliah yang terdaftar pada PortakLkademik UNP dan LMS Elearning UNP pada Semester berjalan, memiliki Default seting Tidak Aktif (*Disable*)
 - b. Dosen memperoleh Pengesahan Dokumen Perkuliahan dari Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan/ Wakil Dekan I/ Dekan untuk digunakan pada Perkuliahan Daring.
 - c. Dosen mendaftarkan Mata Kuliah yang dibina untuk diselenggarakan secara Daring ke BAK melalui Prodi masing-masing pada halaman : <http://elearning.unp.ac.id/register>,
2. Struktur perkuliahan daring terdiri dari:
 - a. Deskripsi Topik yang berisi topik perkuliahan selama satu kali pertemuan.
 - b. Capaian Pembelajaran yang berisi capaian perkuliahan selama satu kali pertemuan
 - c. Materi yang berisi materi selama satu kali pertemuan dan dapat terdiri dari berbagai format teks, (pdf, doc, ppt, excel, e-book) maupun audio visual (jpeg, audio wav, video MP4, vicon) serta berbagai bentuk format digital lainnya.
 - d. Rangkuman yang berisi rangkuman materi selama satu kali pertemuan setelah mahasiswa mempelajari dan mengikuti kegiatan perkuliahan.
 - e. Diskusi, berupa ruang yang disediakan untuk dosen dan mahasiswa melakukan diskusi baik dalam waktu yang bersamaan (chatting-synchronous) maupun dalam waktu yang berbeda (forum-a synchronous).

- f. Tugas, berupa aktivitas belajar yang menunjukkan kemajuan kerja (progres) mahasiswa.
- g. Tes Formatif, berupa aktivitas belajar yang mengukur ketercapaian tujuan perkuliahan selama satu kali pertemuan. Aktivitas tes formatif dapat berupa kuis, penugasan, dan partisipasi pada forum diskusi.
- h. Referensi yang mencantumkan referensi yang digunakan untuk satu kali pertemuan.

Dosen mengambil daftar hadir mahasiswa setiap pelaksanaan perkuliahan daring dengan menggunakan aktivitas/fitur *chat* yang disetting sesuai dengan jadwal perkuliahan yang terdaftar pada portal akademik. Data *chat* ini sebagai bukti untuk mengisi absensi online di portal akademik.

Untuk menjamin mutu pembelajaran, Pusat Penjaminan Mutu LP3M, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat program studi bertanggungjawab memonev pelaksanaan perkuliahan daring. Perkuliahan daring UNP berfungsi sebagai pengganti/*substitusi* perkuliahan/tatap muka konvensional untuk meminimalisir kendala jarak, biaya dan waktu. Waktu pelaksanaan perkuliahan untuk satu kali pertemuan bersifat fleksibel dan dapat berlangsung satu minggu, sesuai dengan jadwal kuliah konvensional yang telah ditentukan sampai dengan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Hasil belajar mahasiswa dapat dinilai dengan melihat kehadiran, partisipasi, dan tingkat pemahaman mahasiswa, melalui quiz/ulangan serta penugasan dengan berpedoman kepada matrik penilaian.

3. Persyaratan Perkuliahan Daring

Secara yuridis formal UNP sudah melegalisasi pelaksanaan perkuliahan secara daring sejak tahun 2018, meskipun secara de facto sudah melakukannya sejak beberapa tahun yang lalu. Rektor UNP menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 08 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perkuliahan Melalui E-learning di Universitas Negeri

Padang. Beberapa prasyarat yang diperlukan dalam melaksanakan perkuliahan daring di UNP, adalah:

- a. Dosen harus memiliki Program Mapping (silabus dan RPS) yang menggambarkan pokok bahasan dan aktivitas pembelajaran daring.
 - b. Dosen harus mempunyai materi ajar untuk setiap pertemuan dalam bentuk teks dengan format pdf/docs./ppt/e-book, flash, scorm dan konten digital lainnya dengan menggunakan multi referensi minimal 10 tahun terakhir kecuali untuk *grand theory*.
 - c. Dosen harus mempunyai materi ajar berbentuk video/gambar/animasi/sebagai pendukung pematapan materi yang diproduksi oleh dosen sendiri ataupun menggunakan sumber lainnya.
 - d. Pelaksanaan perkuliahan harus memenuhi kelengkapan struktur perkuliahan daring.
 - e. Dosen harus memiliki matrik penilaian kuliah daring yang disetting menggunakan fitur yang disediakan LMS maupun matrik penilaian secara manual.
4. Prosedur Penyelenggaraan perkuliahan daring
- a. Dosen dan mahasiswa mengakses <http://elearning.unp.ac.id> melalui *browser*.
 - b. Dosen dan mahasiswa *Login* menggunakan *user* dan *password* yang sama dengan portal akademik
 - c. Pada halaman utama, dosen dan mahasiswa memilih kode seksi mata kuliah yang dilaksanakan secara daring.
 - d. Dosen melakukan berbagai aktivitas pembelajaran dengan menggunakan berbagai fitur (*activity or resources*) yang disediakan pada *platform elearning* UNP dengan memperhatikan struktur perkuliahan daring.
 - e. Dosen dapat menyajikan materi dan atau konten perkuliahan yang terdiri lebih dari 1 (satu) babak untuk mengakomodir sub pokok bahasan atau sub topik.
 - f. Dosen melaksanakan perkuliahan daring yang memuat aktivitas/interaksi dosen dengan mahasiswa atau antar sesama

BAB V PENUTUP

- mahasiswa sesuai perencanaan Program Mapping (RPS dan SAP) yang telah dirancang.
- g. Dosen menyampaikan kesimpulan disetiap akhir pokok bahasan sebagai bentuk penyamaan persepsi yang bisa dilakukan dengan komunikasi *asynchronous* (tidak langsung) berupa teks atau audio visual maupun *synchronous* (langsung/*live event*) berupa *video conference*.
 - h. Dosen melakukan berbagai aktivitas penilaian dengan menggunakan berbagai fitur aktivitas yang disediakan pada *platform elearning* UNP seperti penugasan, quiz/SCORM, forum diskusi, chat, video conference, dan portofolio.
 - i. Dosen melakukan penilaian terhadap aktivitas pembelajaran mahasiswa dengan berpedoman kepada matrik penilaian manual atau dengan menggunakan settingan *grade* pada fitur-fitur LMS.

Pada prinsipnya semua mata kuliah dapat ditetapkan sebagai mata kuliah daring jika mengikuti prosedur yang ada. Mata Kuliah yang telah memperoleh persetujuan untuk diselenggarakan secara daring diaktifasi menjadi Aktif (*Enable*) pada e-learning UNP. Selanjutnya dosen mengupload konten perkuliahan daring yang telah dikembangkan untuk perkuliahan Satu Semester, sesuai dengan daftar mata kuliah yang telah diaktifasi/disetujui. Ketua program studi melakukan verifikasi kelengkapan konten daring yang telah diupload. Mata kuliah yang telah memperoleh verifikasi kelengkapan konten daring diusulkan untuk ditetapkan sebagai mata kuliah daring. Pimpinan Universitas lalu menerbitkan Surat Ketetapan mata kuliah daring dan Surat Tugas dosen mata kuliah daring.

Panduan ini dimaksudkan untuk membantu pengimplementasian proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan terkini pendidikan di Indonesia. Beberapa faktor yang sangat menentukan adalah ditetapkannya paradigma Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka di perguruan tinggi di Indonesia. Paradigma ini diformalkan melalui serangkaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di awal tahun 2020. Meskipun, beberapa program studi baru saja melakukan revisi kurikulum, namun tentu saja kebijakan pemerintah pusat ini harus direspon dengan serius agar tetap relevan.

Sebagian kurikulum yang ada belum mengakomodir era Revolusi Industri 4.0 yang saat ini menjadi semakin massif dan melakukan penetrasi pada setiap level kehidupan masyarakat dan dunia internasional. Saat ini, UNP menerapkan visi dan misi barunya untuk menjadi Universitas Unggul di Asia. Karena itu, setiap program studi dan komponen universitas harus bergerak secara simultan dalam menyongsong perubahan yang cukup radikal di masa depan. Kita semua berharap, panduan pengembangan kurikulum UNP ini dapat menjadi pedoman bagi program studi dalam melakukan pembenahan kurikulum menuju program studi yang tidak saja kuat dari segi keilmuannya tetapi juga mampu menghasilkan alumni yang memiliki daya saing serta dibutuhkan di dunia kerja. Alumni juga harus senantiasa mampu melakukan inovasi dan responsif terhadap situasi global yang semakin dinamis di masa depan.

LAMPIRAN

A. Format/Tempate Kurikulum UNP

Tabel 19. Struktur Buku Kurikulum Program Studi

Buku Kurikulum	
1.	Rasional Pada bagian ini ditulis alasan pengembangan kurikulum sebagai hasil <i>tracer study</i> dan komunikasi dengan <i>stake holders</i>
2.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran Pada bagian ini ditulis visi dan misi Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Prodi. Khusus untuk prodi ditulis juga tujuan dan sasaran prodi.
3.	Profil Lulusan Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studi.
4.	Kemampuan Lulusan Pada bagian ini dituliskan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan sesuai dengan profil lulusan dan standar KKNI.
5.	Capaian Pembelajaran Lulusan Pada bagian ini dituliskan kemampuan yang dicapai melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan akumulasi pengalaman.
6.	Pemilihan Bahan Kajian Pada bagian ini dituliskan bahan kajian untuk setiap setiap capaian pembelajaran lulusan yang mencakup berbagai cabang ilmu atau sub cabang ilmu.
7.	Mata Kuliah dan Besaran SKS Pada bagian ini dituliskan daftar mata kuliah dan lama waktu yang diperlukan untuk mempelajarinya (dikompilasi menjadi besaran SKS)
8.	Struktur Mata Kuliah Pada bagian ini disusun mata kuliah menjadi lebih terstruktur pengelompokannya dan tahap penawaran (semester) pada mahasiswa.

Buku Kurikulum	
9.	Deskripsi mata kuliah Pada bagian ini dituliskan deskripsi setiap mata kuliah secara spesifik yang memperlihatkan perbedaannya dengan mata kuliah lain.
10.	Catatan Pada bagian ini dituliskan kalau ada keterangan tertentu, makna bintang yang diberikan, istilah khusus dan lain-lain.

B. Struktur RPS

Untuk setiap mata kuliah wajib dibuat rencana pembelajaran semester (RPS) dengan pola tertentu, misalnya

1. Nama Program Studi
2. Nama, kode mata kuliah, jumlah SKS
3. Nama dosen pengampu
4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
5. *Softskill*
6. Matrik Pembelajaran

Tabel 20. Struktur Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Minggu ke-	Sub-CPMK	PB	BK	BMP	KTP	R
1						
2						

Catatan:

Sub-CPMK : Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

PB : Pengalaman Belajar

BK : Bahan Kajian

BMP : Bentuk (kuliah, responsi, tutorial, dll) dan Metode (studi kasus, diskusi kelompok, kolaboratif, dll) Pembelajaran

KTP : kriteria dan teknik penilaian

R : Referensi

C. Rekapitulasi Struktur Kurikulum dan Distribusi SKS Program Studi

Tabel 21. Rekapitulasi Struktur Kurikulum dan Distribusi SKS Program Studi

No	Jurusan	Program Studi	Kelompok Matakuliah								Jml
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		D3									
		D4									
		S1 Kependidikan									
		S1 Non Kependidikan									
		S2									
		S3									

Keterangan Kelompok Mata kuliah :

- 1= Mata Kuliah Wajib Nasional (MKWN)
- 2= Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)
- 3= Mata Kuliah Pilihan Universitas (MKPU)
- 4= Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF)
- 5= Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP)
- 6= Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP)
- 7= Mata Kuliah Merdeka Belajar Dalam Kampus (MKMBDK)
- 8= Mata Kuliah Merdeka Belajar Luar Kampus (MKMBD)

D. Struktur Mata Kuliah Program Studi (S1)

Tabel 22. Stuktur Mata Kuliah Program Studi (S1)

No	Kode	Matakuliah	SKS				Sem
			Jml	T	P	L	
1) Mata Kuliah Wajib Nasional (MKWN)							
1	UNP1.60.1401	Pendidikan Agama					
2	UNP1.60.1402	Pendidikan Pancasila					
3	UNP1.60.1403	Pendidikan Kewarganegaraan					
4	UNP1.60.1404	Bahasa Indonesia					
		Koding					
Jumlah SKS			9				
2) Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)							
1							
2							
3							
Jumlah SKS							
3) Mata Kuliah Pilihan Universitas (MKPU)							
1							
Jumlah SKS							
4) Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF)							
1							
2							
3							
Jumlah SKS							
5) Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP)							
1							

No	Kode	Matakuliah	SKS				Sem
			Jml	T	P	L	
2							
3							
Dst							
Jumlah SKS							
6) Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP)							
1							
2							
3							
Jumlah SKS							
7) Mata Kuliah Merdeka Belajar Dalam Kampus (MKMBDK)							
1							
2							
3							
Jumlah SKS							
8) Mata Kuliah Merdeka Belajar Luar Kampus (MKMBLK)							
1							
2							
3							
Jumlah SKS							
Total SKS							

Keterangan: T = Teori, P = Praktek, L = Lapangan

E. Tim Penyusun

TIM PENYUSUN PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNP

Pengarah : Prof. Ganefri, Ph.D.

Penanggungjawab : Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs., M.Si.

Ketua : Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D.
Sekretaris : Yohandri, M.SI., Ph.D.
Prof. Dr. Atmazaki, M. Pd
Dr. Umar, MS, AIFO.
Dr. Hadiyanto, M.Ed.
Dr. Refnaldi, S. Pd, M.Litt.
Dr. Yuliana, SP, M.Si.
Dr. Marwan, S. Pd, M.Si.
Dr. Zul Amri, M. Ed
Okki Trinanda, SE., M.M.
Muhammad Adri, S.Pd, MT

Sekretariat : Drs. Yushamdi
Murni Sukmawati, S.Kom, M.Pd.
Ahmad Rizal Abidin, S.Kom, M.Kom.
Erlina Surya Negara, S.Si.
Jon Asli, S.Sos.